

# JURNAL

# KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 11	No. 2	Hal. 91 - 180	Jakarta Juni 2021	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	---------------	----------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan

**JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

---

**Volume 11 Nomor 2, Desember 2021**

**Penanggung Jawab :**

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

**Dewan Redaksi :**

**Ketua:**

Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

**Anggota:**

Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Achmad Rizal (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

**Redaksi Pelaksana :**

Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A.

Nila Mustika Wati, S.S.

Dr. Irwan Muliawan

Nendah Kurniasari, M.Si.

Rizki Aprilian Wijaya, M.T.

Edwin Yulia Setiawan, S.T.

Nurhendra, S.Kom.

Candra Istiana, S.ST.Pi.

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S.I.Kom.

**Desain dan Tata Letak :**

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

**Alamat Redaksi :**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.bosek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Berbasis Hak di Sungai Sebangau, Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah; (ii) Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat; (iii) Status dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan di Indonesia; (iv) Program Strategis Dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar); (V) Pembelajaran Pembangunan Pulau Terluar Berbasis Sektor Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus SKPT Biak Numfor; (vi) Peluang dan Tantangan Pengembangan Bisnis Inklusif Perikanan Tuna Skala Kecil di Pulau Morotai, dan; (vii) Model Suaka Ikan Untuk Pengelolaan Sungai di Jawa: Studi di Sungai Winongo Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

**Redaksi**

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

---

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 11 Nomor 2, Desember 2021 adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP (*Ekonomi Sumberdaya Pesisir - Universitas Brawijaya*)
2. Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto. MP (*Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
3. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
4. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si. (*Ekonomi Sumber Daya - IPB University*)
5. Dr. Suhana (*Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim*)
6. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (*Evaluasi Ekonomi Sumberdaya Alam - Universitas Negeri Makassar*)
7. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. (*Antropologi - Universitas Gadjah Mada*)
8. Dr. Dian Wijayanto, SPi, MM, MSE (*Ilmu Ekonomi - Universitas Diponegoro*)
9. Umi Muawanah, Ph.D (*Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
10. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
11. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
12. Risna Yusuf, M.Si (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)

**JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Volume 11 Nomor 2, Tahun 2021**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH <i>Oleh : Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto</i> .....	91 - 102
MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT <i>Oleh : Maya Shafira dan Mashuril Anwar</i> .....	103 - 117
STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA <i>Oleh : Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni</i> .....	119 - 126
PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar) <i>Oleh : Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen</i> .....	127 - 142
PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR <i>Oleh : Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty</i> .....	143 - 154
PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI <i>Oleh : Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni</i> .....	155 - 167
MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA <i>Oleh : Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud</i> .....	169 - 180

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU,  
TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH

*Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River,  
Sebangau National Park Central Kalimantan*

Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto

**ABSTRAK**

Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.

**Kata Kunci:** nelayan; pengelolaan berbasis hak; taman nasional; perikanan tangkap; Sebangau

**ABSTRACT**

*The Sebangau River, Central Kalimantan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the river. It was indicated by the occurrence of eight fish families and the black colour of river water. On the social institutional aspect, it was found that: (1) Kinship systems were the social capital for the foundation of social life, (2) Fishing is the main economic activity, but it has a high level of income uncertainty for the fishers, (3) The fishers are supported by damang, facilitators from Balai TNS, and WWF Central Kalimantan as river management and building associative and dissociative interactions. This study provides direction for enforcing the rules in maintaining a rights-based inland fisheries management system in Sebangau River.*

**Keywords:** capture fisheries; fisherman; national park; right-based fisheries; Sebangau

# MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

## *Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management Policy*

Maya Shafira dan Mashuril Anwar

### ABSTRAK

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah-wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.

**KataKunci:** Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

### ABSTRACT

*The shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.*

**Keywords:** Lampung; authority; management; coastal; public

# STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA

## *Utilization Status and Problems of Crab Resources in Indonesia*

Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti,  
Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni

### ABSTRAK

Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan perbandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalian upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia.

**Kata Kunci:** rajungan; musim buka tutup; alat tangkap; upaya penangkapan; konflik

### ABSTRACT

*There is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.*

**Keywords:** crab; open season close; fishing gear; catch effort; conflict



# PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)

## *Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )*

*Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen*

### ABSTRAK

Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu *Interpretative Structural Modeling (ISM)* dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan *Conservation International Indonesia* berada pada posisi *key player*, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampung-kampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiliki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders*, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** ekowisata bahari; kampung wisata; kelembagaan; kendala kelembagaan; pengembangan ekowisata; program strategis; Raja Ampat

### ABSTRACT

*Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International Indonesia are the key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village of Raja Ampat has several institutional obstacles. The main obstacle is conflict over space utilization in the environmental service card tariff management system. To overcome the obstacles, it is necessary to implement strategic programs effectively. This study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders, community empowerment, increasing conservation effectiveness, and distributing access to the community.*

**Keywords:** *ecotourism development; institutional; institutional constraints; marine ecotourism; tourism village; strategy program; Raja Ampat*

## PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR

### *Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak Numfor*

Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty

#### ABSTRAK

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari Nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/ pinggirannya. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggirannya adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkap kinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal.

**Kata Kunci:** SKPT; pulau terluar; *exogenous development*; sumber daya manusia; kelembagaan

#### ABSTRACT

*The concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave local communities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.*

**Keywords:** SKPT, outer islands, *exogenous development, human resources, institutions*

# PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI

## *Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai Island*

Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni

### ABSTRAK

Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis.

**Kata Kunci:** peluang; tantangan; tuna; skala kecil; bisnis inklusif; rantai pasok; SWOT; Morotai

### ABSTRACT

*The potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained by fishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in the existing business system in the Morotai Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The tuna inclusive business development strategy in Morotai that can be recommended from the results of this study is the implementation of an integrated fisheries management model supported: (i) a market that accommodates supply chain investors, (ii) the opening of bank capital access, and (iii) fisher's partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.*

**Keywords:** prospect; challenge; tuna; small scale; inclusive business; supply chain; SWOT; Morotai

# MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA

*Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River Yogyakarta*

Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud

## ABSTRAK

Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suaka ikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam. Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa.

**Kata Kunci:** suaka ikan; model pengelolaan sungai; konservasi; kepentingan ekonomi; partisipasi masyarakat

## ABSTRACT

*The decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community's involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river. However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries reserve needs to concern with the conservational aspect and the economic interest of the community. Both principles can be accommodated in the zone Fisheries reserve model. The modification of fisheries reserve from the pure conservation to zone model can be an alternative for the policy model in river management in Java.*

**Keywords:** fisheries reserve; river management model; conservation; economic interest; community participatio

**(Indeks Pengarang)**  
**(Author Index)**

Aini, Nur .....	127 - 142
Anwar, Mashuril .....	103 - 117
Bengen, Dietrich G. ....	127 - 142
Hadiastuty, Harnita .....	143 - 154
Huda, Hakim Miftakhul .....	119 - 126 155 - 167
Jaya, Pajar Hatma Indra .....	
Kamal, M .....	91 - 102
Kurniawan, Tikkyrino .....	143 - 154
Muhartono, Rizky .....	143 - 154
Nurseptiani, Sita .....	91 - 102
Ramadhan, Andrian .....	143 - 154
Sari, Yesi Dewita .....	119 - 126
Satria, Arif .....	127 - 142
Shafira, Maya .....	103 - 117
Suhud, Moh Abu .....	169 - 180
Surjanto, Didiel .....	91 - 102
Taryono, Taryono .....	91 - 102
Triyanti, Riesti .....	119 - 126 155 - 167
Wahyuni, Ekawati .....	127 - 142
Wijaya, Riski Aprilian .....	119 - 126 155 - 167
Zamroni, Achmad .....	119 - 126 155 - 167

**(Indeks Subjek)**  
**(Subject Index)**

alat tangkap .....	119 - 126
bisnis inklusif .....	156 - 167
ekowisata bahari .....	127 - 142
exogenous development .....	143 - 154
kampung wisata .....	127 - 142
kelembagaan .....	127 - 142
kelembagaan .....	143 - 154
kendala kelembagaan .....	127 - 142
kepentingan ekonomi .....	169 - 180
kewenangan .....	103 - 117
konflik .....	119 - 126
konservasi .....	169 - 180
Lampung .....	103 - 117
masyarakat .....	103 - 117
model pengelolaan sungai .....	169 - 180
Morotai .....	156 - 167
musim buka tutup .....	119 - 126
nelayan .....	91 - 102
partisipasi masyarakat .....	169 - 180
peluang .....	156 - 167
pengelolaan .....	103 - 117
pengelolaan berbasis hak .....	91 - 102
pengembangan ekowisata .....	127 - 142
perikanan tangkap .....	91 - 102
pesisir .....	103 - 117
program strategis .....	127 - 142
pulau terluar .....	143 - 154
Raja Ampat .....	127 - 142
rajungan .....	119 - 126
rantai pasok .....	156 - 167
Sebangau .....	91 - 102
skala kecil .....	156 - 167
SKPT .....	143 - 154
suaka ikan .....	169 - 180
sumber daya manusia .....	143 - 154
SWOT .....	156 - 167
taman nasional .....	91 - 102
tantangan .....	156 - 167
tuna .....	156 - 167
upaya penangkapan .....	119 - 126



**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Gedung BRSDM KP LT. 3  
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara  
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924  
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>  
email : [kebijakan.asek@gmail.com](mailto:kebijakan.asek@gmail.com)

ISSN 2089-6980

